

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Kesejahteraan**

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 2008).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu: Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara

untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel, dalam Sugiarto 2007):

- a. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- b. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
- c. Pendekatan *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Todaro (dalam Hidayat, 2014) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan

yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional (*gross national products*).

Menurut Jayadinata (dalam Hidayat, 2014), bahwa pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan, antara lain:

- a. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat;
- b. Memilih tujuan yang sesuai untuk mencapai tujuan itu;
- c. Menyusun kembali (*restructuring*) masyarakat dengan maksud agar terjadinya pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2008). Lebih lanjut Suharto (2008), menyatakan bahwa tujuan

pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- a. Peningkatan standar hidup, melalui perangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Menurut Nurdin (dalam Hidayat, 2014), timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial disebabkan oleh 5 hambatan:

- a. Ketergantungan Ekonomi. Ketergantungan ekonomi merupakan hambatan utama yang menyebabkan adanya berbagai masalah. Hal ini dapat dilihat pada kesulitan yang dialami individu, kelompok dan masyarakat. Sebab dari Ketergantungan ekonomi sebagian besar disebabkan kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimal dalam kehidupannya, atau ketidakmampuan mengelola pendapatan mereka yang seharusnya dapat mencukupi. Dari hambatan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial antara lain kemiskinan.

- b. Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri. Ketidakmampuan menyesuaikan diri ini timbul dari masalah kemiskinan dan emosional, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri. Hal ini merupakan jenis hambatan yang dikenal dengan istilah “hambatan sosial psikologis”. Masalah yang dapat timbul dari permasalahan ini antara lain: seseorang mengalami perubahan, baik sikap maupun perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Masalah-masalah penyesuaian diri dapat menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti kenakalan remaja, pelacuran dan lain sebagainya;
- c. Kesehatan yang Buruk. Kesehatan yang buruk dapat disebabkan beberapa faktor: lingkungan yang buruk atau kotor, adanya berbagai penyakit dan ketidaktahuan anggota masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut berkaitan pula dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Persoalan-persoalan yang bersumber dari berbagai faktor diatas dapat menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan penyakit-penyakit menular, kekurangan gizi, yang akhirnya menuju kematian;
- d. Rekreasi dan Pengisian Waktu Senggang. Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi-fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, pembebasan dari suasana rutin yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung

jawab yang berat, atau perasaan jenuh selama bekerja di kantor. Perlunya memperhatikan rekreasi dan pengisian waktu luang yang positif setiap ada waktu luang yang digunakan dengan baik sifatnya cenderung digunakan secara negatif. Pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti kenakalan remaja, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pencurian dan perampokan.

- e. Kondisi Sosial, Penyediaan dan Pengelolaan Pelayanan Sosial yang Kurang atau Tidak Baik. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik misalnya keadaan lingkungan pergaulan yang buruk sehingga dapat dengan kuat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana pendidikan yang memadai dan sebagainya. Masalah-masalah dapat ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dapat menjangkau penerima pelayanan.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Indikator kesejahteraan suatu daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO<sup>2</sup>, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB) (Thomas, dalam Sugiarto 2007).

Kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (H), sumber daya fisik (K) dan sumber daya lain (R). Ketiga sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal. Golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka (Todaro, dalam Hidayat: 2014)

Ukuran yang digunakan berbagai negara untuk tingkat kesejahteraan masyarakat adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia)/ HDI (*Human Development Index*). HDI adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. (UNDP, 1990)

Indeks HDI berawal dari gagasan terhadap keterbatasan dari pendapatan per kepala sebagai dasar untuk memonitor hasil pembangunan. Keterbatasan yang dirasakan adalah tidak adanya konsistensi ketika unsur

pendapatan dikorelasikan dengan berbagai aspek yang terkait dengan manusia, seperti masa hidup manusia, kesehatan dan kepandaian membaca.

## 2. *Foreign Direct Investment (FDI)*

*Foreign Direct Investment* adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. (Krugman, 2012). Penanaman modal asing secara langsung menurut *Organization for Economic Cooperation (OEC)* adalah suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya (Panjaitan dan Sianipar, dalam Hidayat, 2014).

*Foreign direct investment* dapat diartikan sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. *Foreign direct investment* merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. *Foreign direct investment* dianggap lebih berguna bagi negara dibandingkan investasi pada ekuitas perusahaan karena investasi ekuitas berpotensi terjadinya *capital outflow* sebab investasi ekuitas ini lebih bersifat jangka pendek dan sewaktu-waktu dapat ditarik secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan kerentanan ekonomi.

Menurut Krugman (2012) *foreign direct investment* adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau



memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non migas yang berdaya saing di tingkat internasional. Menurut Feldstein (dalam Devi, 2014) aliran *foreign direct investment* memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

- a. Aliran modal tersebut mengurangi risiko dari kepemilikan modal dengan melakukan deversifikasi melalui investasi;
- b. Integrasi global pasar modal dapat memberikan *spread* terbaik dalam pembentukan *corporate governance*, *accounting rules*, dan legalitas; dan
- c. Mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah.

Krugman (2012) berpendapat bahwa *foreign direct investment* tidak hanya mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam *corporate governance mechanism*. Selain itu, Negara penerima (*host country*) *foreign direct investment* juga akan menerima keuntungan antara lain adanya alih teknologi (*transfer of technology*), dalam bentuk varietas baru dari *capital inputs* yang tidak dapat dicapai melalui investasi keuangan (*financial investment*) atau perdagangan

barang dan jasa. *Foreign direct investment* juga dapat mempromosikan kompetisi pada pasar domestik (*domestic output market*).

Penerima *foreign direct investment* memberikan pelatihan bagi karyawan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di *host country*. Laba yang dihasilkan oleh *foreign direct investment* juga memberikan kontribusi terhadap pajak pendapatan (*corporate tax revenues*) (Razin dan Sadka, 2002). Menurut Fuady (dalam Hidayat, 2014), penanaman modal asing secara langsung dilihat dalam arti sempit, yang dimaksudkan adalah model penanaman asing yang dilakukan dengan mana pihak asing atau perusahaan asing membeli langsung (tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan nasional atau mendirikan perusahaan baru, baik lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau lewat departemen lain.

Menurut Sartono (2001), terdapat beberapa motif strategi mengapa perusahaan-perusahaan melakukan investasi ke luar negeri. Motif-motif tersebut antara lain:

- a. Motif mencari pasar; perusahaan melakukan investasi keluar negeri awalnya didorong oleh keinginan untuk memperoleh tambahan pendapatan dengan memasok barang produksinya ke pasar yang baru.
- b. Motif mencari bahan baku; motif ini menjadi motif dominan yang kedua. Katagori bahan baku antara lain adalah minyak, barang-barang tambang maupun hasil hutan.

- c. Motif mencari efisiensi produksi; hal ini dilakukan pada Negara yang memiliki faktor produksi yang lebih murah relatif pada negara lain.
- d. Motif mencari teknologi dan keahlian manajemen dengan beroperasi di luar negeri seperti perusahaan Jerman, Belanda, Jepang.
- e. Motif mencari keamanan politis.

Tujuan setiap FDI tidaklah sama, perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragam alasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda-beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Menurut Yugiantoro (dalam Hidayat, 2014) Terdapat empat tujuan utama FDI (*Foreign Direct Investment*) yaitu:

- a. Pencari sumber daya,
- b. Pencari pasar,
- c. Pencari efisiensi dan
- d. Pencari aset strategi.

Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, *the Product Cycle Theory* dan *the Industrial Organization Theory of Vertical Organization*.

- a. *The Product Cycle Theory* yang dikembangkan oleh Raymond Vernon yang menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase :
  - 1) Fase permulaan atau inovasi,
  - 2) Fase perkembangan proses

### 3) Fase standardisasi.

Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif (*comparative advantage*).

- b. *The Industrial Organization Theory of Vertical Integration* merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada *new multinasionalism* dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) yang harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengeksport dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya monopoli. Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangai persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan. (Kartadjoemana, 1996).

Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud, yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah dimana FDI menjalankan aktifitasnya

Head (1997) mengemukakan tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing. Ketujuh investasi asing itu adalah:

- a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
- b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
- c. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendapatkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;

- d. Menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
- e. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
- f. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah;
- g. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya dari semula.

Dalam realisasinya, terkait investasi asing yang masuk ke suatu negara sebenarnya terjadi pro dan kontra yang cukup pelik. Pada satu sisi investasi asing dipercaya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan yang kemudian berdampak pada progress peningkatan kesejahteraan masyarakat (Effendi dan Soemantri, 2003). Dampak positif ini terjadi karena adanya transfer teknologi dan keahlian manajerial, pengenalan teknologi produksi yang baru serta akses ke jaringan internasional. Untuk negara yang sedang berkembang, masuknya investasi asing langsung juga berarti adanya kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak. Temuan ini didukung oleh Alfaro, Chandra, Kalemli-Ozcan, dan Sayek (2000) yang juga menyatakan bahwa kehadiran investasi asing langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor keuangan.

Beberapa argumen negatif yang menolak pengaruh positif investasi asing adalah pendapat yang menyatakan bahwa kehadiran investasi asing dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara tujuan (Germidis, 1977). Aitken dan Harisson (1999 dalam Effendi dan Soemantri, 2003) menemukan bahwa dampak investasi asing di Venezuela terhadap produktivitas ekonomi sangat kecil. Temuan ini serupa dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Germidis (1977) yang menyatakan bahwa investasi asing langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

### **3. *Foreign Portfolio Investment (FPI)***

*Foreign Portfolio Investment* adalah masuknya dana ke sebuah negara dimana pihak asing melakukan pembelian saham dan obligasi negara, dan terkadang untuk spekulasi (Sullivan dan Steven, dalam Hidayat, 2014). FPI merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing.

Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau

membuka usaha baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank. Selain itu, dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen. Halim (2003:2) mengatakan bahwa investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau investasi portofolio adalah investasi pada asset finansial (*financial assets*), seperti Investasi di pasar uang (*deposito, sertifikat BI*) dan Investasi di pasar modal (*saham, obligasi, opsi, warrant*).

Menurut Errunza (1986), investasi portofolio oleh investor asing dapat memberikan tiga pengaruh positif, yaitu

- a. mengembangkan pasar modal di negara tujuan (*development effect*),
- b. meningkatkan sumber pendanaan dari luar (*resource effect*), dan
- c. meningkatkan nilai saham yang pada akhirnya meningkatkan nilai portofolio oleh investor lokal (*welfare effect*).

Wahyuningsih (2012) menemukan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi swasta yang dimaksudkan dalam penelitian Wahyuningsih adalah investasi tersebut terdiri dari investasi dalam negeri dan investasi asing. Hasil yang serupa juga dikemukakan Pramono dan Rofi (2012) yang menemukan bahwa PMA memiliki hubungan yang signifikan terhadap IPI.

Lebih spesifik lagi, penelitian yang dilakukan oleh Gheeraert dan Mansour (2005) yang menemukan bahwa *portfolio investment* memiliki hubungan yang paling kuat terhadap HDI dibanding jenis investasi asing



lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang akan lebih memilih investasi jenis portfolio untuk masuk ke negara mereka. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan ketika masuknya investor asing ke dalam negeri akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lewat industri besar yang dijalankan. Hal ini akan berdampak pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan**

Mangkoesoebroto (dalam Putra, 2009), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997).

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seorang terhindar dari kondisi miskin (Zuluaga, dalam Widodo dkk, 2011).

Tingkat pendidikan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, Sinaga dan Oktaviani, 2009).

Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan berkurangnya kemiskinan. Pengeluaran di sektor pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Menurut *Center for the Study of Living Standards* (dalam Widodo dkk, 2011)

menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari upaya eksploitasi. Demikian juga pernyataan dari UNICEF yang mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi.

## **5. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karenanya kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, memadai, terjangkau dan berkualitas (Widodo dkk, 2011).

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang

disediakan oleh pemerintah. Tidak hanya bagi usia dewasa namun juga anak-anak. Sebagai Negara berkembang yang sangat rentan akan masalah kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah. Jika dibandingkan dengan dengan masa sebelum orde baru, maka sejak orde baru hingga saat ini, perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan.

Hal ini diukur dari indikator kesehatan antara lain tingkat kematian bayi, kecukupan gizi anak-anak dan remaja, kondisi sanitasi umum, jumlah dokter dan juru rawat, serta jumlah rumah sakit dan puskesmas, sudah mengalami perkembangan cukup pesat. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Gheeraert dan Mansour (2005) yang berjudul “*On the Impact of Private Capital Flows on Economic Growth and Development*”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah FDI, *portfolio investment*, *debt investment* dan *equity investment* sebagai variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP dan HDI. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa FDI berpengaruh positif signifikan terhadap GDP, *portfolio investment* berpengaruh positif signifikan terhadap GDP, *equity financing* berpengaruh positif signifikan terhadap GDP, *Debt investment* berpengaruh positif signifikan terhadap GDP. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa *portfolio investment* memiliki hubungan yang paling kuat terhadap HDI disbanding jenis investasi asing lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang akan lebih memilih investasi jenis *portfolio* untuk masuk ke negara meraka. Disamping *portfolio investment*, diketahui juga bahwa *equity investment* juga memiliki hubungan positif yang kuat terhadap HDI.

2. Penelitian Dabour (2000) yang berjudul “*The Role of Foreign Direct Investment (FDI) in Development and Growth in OIC Member Countries*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran FDI dalam pengembangan dan pertumbuhan di negara-negara anggota OKI dan menjelaskan tantangan yang dihadapi negara-negara anggota OKI dalam menarik FDI secara konsisten sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi masing-masing negara. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah GNP, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah FDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Sebagian besar negara-negara anggota OKI tidak mampu memanfaatkan aliran dana FDI untuk masuk ke negaranya secara maksimal. Kedua, aliran dana FDI mampu mendukung perkembangan dan pertumbuhan negara-negara anggota OKI dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan standar hidup. Ketiga, terdapat suatu kebutuhan mendesak bagi negara-negara anggota OKI untuk meningkatkan aliran dana FDI masuk ke negaranya agar dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan negaranya.

3. Pramono dan Rofi (2012) telah meneliti hubungan penanaman modal asing masuk terhadap indeks pembangunan manusia di asia tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan variabel PMA (Penanaman Modal Asing) sebagai variabel independen, dan variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara PMA dan IPM, Selain itu ditemukan adanya hubungan antara PMA dengan variabel IPM pendapatan per-kapita di tahun 2005, angka harapan hidup, perkiraan lama tahun sekolah, lama tahun sekolah, dan perndapatan per-kapita di tahun 2006, serta lama tahun sekolah di tahun 2007.
4. Penelitian Putri (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM di Provinsi Lampung (Periode 2003-2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PP), sektor pendidikan (PK), dan jumlah penduduk miskin (K) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu (time series) selama periode 2003-2012. Pengujian hipotesis digunakan dengan pendekatan uji asumsi klasik, hipotesis dan *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis

dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Sedangkan variabel jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Dari penelitian ini selain memberikan hasil estimasi juga dapat menyimpulkan beberapa langkah kongkrit yang harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan peningkatan pembangunan manusia. Untuk menunjang kualitas sumber daya manusia terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat yang lebih baik.

5. Penelitian Hadian, Jalili, dan Ghaderi (2013) yang berjudul *Impact of Government Consumption and Investment Expenditures on Human Development Index Using Generalized Method of Moment*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah dan *human development index*. Hasil penelitian menemukan bahwa pada tingkat awal pengembangan menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan IPM. Dalam lebih dari tingkat tertentu (tingkat optimal), ada hubungan negatif antara pengeluaran konsumsi pemerintah dengan IPM. Temuan ini bertentangan di negara dengan PDB per kapita rendah. Elastisitas pengeluaran konsumen terhadap IPM untuk kedua kelompok negara dengan GDP tinggi dan rendah per kapita lebih tinggi dari pengeluaran investasi.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih menfokuskan pada penggunaan variabel investasi asing yang terdiri dari FDI dan FPI serta pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan HDI.

### **C. Hipotesis Penelitian**

#### **1. Pengaruh FDI (*Foreign Direct Investment*) terhadap kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara**

*Foreign direct investment* dapat diartikan sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. *Foreign direct investment* merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. *Foreign direct investment* dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio karena pada investasi portofolio berpotensi terjadi *capital outflow* sebab investasi portofolio lebih bersifat jangka pendek dan sewaktu-waktu dapat ditarik secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan kerentanan ekonomi. Lebih lanjut, *Foreign direct investment* pada sebuah negara akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan investasi portofolio.

Dana *Foreign direct investment* masuk pada sebuah negara dengan mendirikan suatu perusahaan tertentu. Adanya pendirian perusahaan baru membutuhkan tenaga kerja yang besar. Hal ini menjadi kesempatan masyarakat untuk masuk ke dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gheeraert dan Mansour



(2005) yang menemukan bahwa FDI berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan GDP.

**H1: Terdapat pengaruh FDI (*Foreign Direct Investment*) terhadap kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara**

## **2. Pengaruh *Foreign Portfolio Investment* terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

*Foreign Portfolio Investment* adalah masuknya dana ke sebuah negara dimana pihak asing melakukan pembelian saham dan obligasi negara, dan terkadang untuk spekulasi (Sullivan dan Steven, dalam Hidayat, 2014). FPI merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing.

Besarnya aliran dana FPI yang masuk ke dalam lima negara ASEAN berdampak pada kebijakan perusahaan dalam negeri untuk mengembangkan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono dan Rofi (2012) yang menemukan bahwa PMA memiliki hubungan yang signifikan terhadap HDI. Selanjutnya pada penelitian Gheeraert dan Mansour (2005) yang mengungkapkan bahwa portfolio investment memiliki hubungan yang paling kuat terhadap HDI dibanding jenis investasi asing lainnya.

**H2: Terdapat pengaruh FPI (*Foreign Portfolio Investment*) terhadap kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara**

**3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seorang terhindar dari kondisi miskin (Zuluaga, dalam Widodo dkk, 2011).

Tingkat pendidikan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, Sinaga dan Oktaviani, 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor pendidikan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

**H3: Terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara**

#### **4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karenanya kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera . Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, meningkatkan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hadian, Jalili, dan Ghaderi (2013) menjelaskan bahwa pada tingkat tertentu (tingkat optimal), ada hubungan antara pengeluaran konsumsi pemerintah dengan IPM.

**H3: Terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di negara kawasan Asia Tenggara**